BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : AMDAL
Edisi : 20 Februari 2008
Halaman : 11

Bangun Pantura dengan Amdal Lokal atau Regional?

Pengantar

Bencana banjir yang terjadi di Kota Jakarta di awal Februari 2008 ini telah membuka mata kita semua. Betapa kota metropolitan yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa ini memiliki kerentanan mengalami bencana khususnya banjir yang sangat tinggi, hingga jalan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng pun tergenang. Wartawan *S,* Erwin Lobo mencoba menganalisis apa yang terjadi dengan pembangunan di kawasan pantau utara (Pantura) Jakarta hingga banjir melalui sorotan berikut ini.



.SP/Ruht Semiono

Proyek pembanguan rumah susun Cilincing terus dikerjakan walau berada di pesisir Marunda, Jakarta Utara, Senin (11/12). Maraknya lahan yang direklamasi di pantai utara Jakarta dan rusaknya ekosistem seperti pohon bakau membuat Jakarta selalu berpotensi terkena abrasi air laut.

Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Pepatah ini mau menyatakan setiap hal baik itu sukacita maupun dukacita yang terjadi pada diri seseorang, atau sekelompok orang, bahkan di sebuah negara pasti memiliki maksud tertentu di balik peristiwa itu.

Hujan dengan intensitas tinggi telah melumpuhkan sejumlah aktivitas masyarakat. Lokasi banjir yang paling mendapat sorotan hingga saat ini adalah peristiwa tergenangnya beberapa ruas jalan Tol Sedyatmo.

Kejadian banjir di ruas jalan tersebut menjadi sorotan, karena jalan tol ini menjadi urat nadi transportasi dari Kota Jakarta ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten.

Tergenangnya jalan tol ini membuat semua jadwal penerbangan terganggu baik dari arah bandara maupun menuju bandara.
Tentu saja, peristiwa ini menjadi publikasi buruk bagi Indonesia di mata internasional. Apalagi tahun ini, pemerintah mencanangkan sebagai tahun kunjungan atau "Visit Indonesia Years 2008".

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Bencana banjir yang terus terjadi hampir setiap tahun di Ibukota Jakarta dengan intensitas dan dampak yang semakin besar tentu saja mengusik hati dan akal sehat kita khususnya warga Jakarta. Tidak terkecuali Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar.

Pertanyaan mengusiknya adalah apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mampu mengatasi persoalan banjir ini? Ataukah bukan tidak mau, tetapi tidak mau?

Seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta, baru-baru ini, Rachmat Witoelar menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan audit lengkap terhadap semua proyek-proyek pembangunan di kawasan Pantura Jakarta khususnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Aksi audit yang akan segera dilakukan pemerintah pusat di kawasan pantura ini didasarkan pada perkiraan bahwa dampak bencana banjir yang semakin hebat juga turut disebabkan pembangunan di kawasan tersebut terutama yang berhubungan dengan proyek reklamasi, tidak memperhatikan atau menjalankan kaidah-kaidah lingkungan hidup.

Witoelar mengaku tidak main-main dengan rencananya tersebut. "Kalau dalam audit ditemukan kesalahan dan yang bersalah tidak mau memperbaiki sesuai saran kami, maka kami akan bawa masalahnya ke pengadilan," tegasnya.

"Kegeraman" Menteri LH ini diduga dipicu sikap pengembang dan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak memperhatikan berbagai saran dan kajian ilmiah yang dilakukan Kementerian LH.

Misalnya, proyek-proyek reklamasi pantura yang kajian analisis dampak lingkungan hidupnya (amdal) ditolak mentah-mentah Kementerian LH, ternyata di lapangan proyek-proyek itu berjalan terus dengan mengantongi amdal dari Pemprov DKI Jakarta.

"Kami akan perhatikan serius mengenai reklamasi ini khususnya yang terjadi Muara Angke," katanya.
Deputi I Menteri LH bidang Tata Lingkungan, Hermin Roosita, menjelaskan, awalnya kajian amdal untuk kawasan pantura adalah amdal regional, karena menyangkut reklamasi di dua provinsi yakni Banten dan DKI Jakarta. Namun, karena Amdal (regional) pantura yang diajukan para pengembang selaku pemrakarsa dinyatakan tidak layak, para pengembang pun mencari akal agar memperoleh amdal namun tidak melibatkan Kementerian LH.

"Mereka (pengembang) akhirnya melakukan reklamasi di Provinsi DKI Jakarta saja, sehingga Amdal yang digunakan adalah Amdal parsial atau yang biasa disebut juga amdal lokal," ujar Hermin.

Menurut Hermin, banyaknya proyek-proyek reklamasi yang menggunakan kajian amdal lokal akan membawa dampak negatif khususnya terhadap daerah-daerah sekitar proyek. Dia mencontohkan, Amdal lokal yang mengkaji reklamasi di Perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) memang berhasil menghindarkan kompleks perumahan elit itu dari banjir, tetapi karena sifat kajiannya lokal, kemungkinan dampak yang timbul di luar perumahan tidak dikaji secara mendalam.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Semua Aspek

Akhirnya bisa ditebak, saat hujan lebat turun, perumahan PIK bebas banjir, sedangkan daerah sekitarnya seperti perkampungan nelayan Muara Angke dan jalan tol tergenang.

Dia mengatakan, seharusnya kajian Amdal di kawasan pantura itu bersifat regional dan kewilayahan bukan justru berdasar lokal proyek. Jika proyek pembangunan di pantura dikaji berdasarkan Amdal regional, semua aspek dari sisi lingkungan dan infrastruktur bisa diperhitungkan yang pada akhirnya nanti bisa meminimalisasi potensi bencana banjir yang kemungkinan terjadi.

"Konkretnya seperti ini, jika dikaji berdasarkan amdal regional, kami akan minta agar pengembang PIK memperlebar saluran sungai Cengkareng Drain. Dalam konteks itulah audit akan dilakukan," katanya.

Berbeda dengan pendapat dari Menteri LH dan Deputinya, Wali Kota Jakarta Utara, Effendy Anas, mengatakan, pengembangan kasawan pantura dengan Amdal lokal atau parsial tidak menyalahi peraturan yang ada. Tudingan yang menyatakan proyek yang dikaji berdasarkan Amdal lokal akan membawa dampak buruk terhadap daerah sekitarnya, ditolak mentah-mentah.

"Amdalnya memang lokal atau parsial, tetapi semua itu didasarkan pada *master plan* kota yang ada," kata Effendy membela diri.
Sementara itu pengamat perkotaan dari Puswika Universitas Indonesia, Hendricus Andi Simarmata, mengatakan, polemik seputar amdal lokal dan regional dalam pembangunan di kawasan pantura harus dilihat secara komprehensif. "Ada persepsi yang harus diluruskan adalah keberadaan Amdal lokal dan Amdal regional," katanya.

Alasannya, berdasarkan PP 27/1999 tentang Amdal, pendekatan studi amdal berdasarkan jenis kegiatannya, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu tunggal, terpadu, dan dalam kawasan. Karena itu, untuk membahas kegiatan di pesisir utara Jakarta, memang tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan studi amdal saja. Penting untuk diingat kembali, bahwa ekosistem pesisir sangat unik dan luas wilayah pengaruhnya, karena merupakan wilayah peralihan dari ekosistem darat dan laut. Tidak hanya multi-kegiatan saja yang dibahas, tetapi juga lintas wilayah dan lintas ekosistem.

Namun, dalam hal permasalahan pantura tersebut, tambahnya, sudah sepatutnya semua pihak dapat memposisikan kembali fungsi amdal sebagai alat pencegah potensi kerusakan lingkungan, dan bukan dijadikan alat untuk mendapatkan manfaat sesaat.

Image Amdal harus objektif dan berorientasi untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan si pemohon izin maupun si pemberi izin. Dan amdal harus dapat menjadi mitra tata ruang yang saling bersinergis satu sama lain.

Solusi dari semua permasalahan di atas, kata anggota Ikatan Ahli Perencana (IAP) ini adalah mengumpulkan semua dokumen Amdal yang telah dilakukan, baik oleh pihak PIK, PT Pembangunan Jaya Ancol, maupun BP Pantura. Harus ada pertemuan teknis yang membahas pendekatan parsial dan integratif. *

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup